

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TA. 2021**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-NYA, Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA AKHIR) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 telah selesai disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kegiatan yang telah diprogramkan pada Rencana Strategis Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2021 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, Mei 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



H.R. GATOT SUWARSO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631017 199003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	26
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	33
BAB. V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan;

Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat guna dan terarah, dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 terutama berpedoman kepada Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016–2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Tanjung Jabung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian, pelatihan dan pendidikan sumber daya aparatur, BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2021 adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Derah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan III tahun 2019
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM**BAB. V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJATAHUN 2019

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Tahun 2019

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) sampai dengan Tahun 2019, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan target kinerja capaian program, Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pada Tahun 2019 Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 3 Program antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Program Peningkatan Motivasi Anggota KORPRI yang terdiri dari 14 (empat Belas) kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel evaluasi dibawah ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja BKPSDM tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BKPSDM s/d 2019	
					Target Renja BKPSDM tahun 2019	Realisasi Renja BKPSDM s/d Triwulan IV Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemakaian Telepon, Air dan Listrik (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan yang tertib (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100

4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik/ penerangan (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300

13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik (Unit)	130	44	20	20	100	22	86	66.15
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pelayanan prima yang baik (Stel)	403	482	82	71	86.59	82	635	157.57
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
18	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi	Meningkatnya Kapasitas Kepemimpinan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (orang)	41	47	29	140	482.76	10	197	480.49

19	Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III	Meningkatnya sumber daya manusia Aparatur CPNS (orang)	854		40	40	100.00	200	240	28.10
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
20	Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS (orang)	950	70	150	353	235.33	150	573	60.32
21	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja (orang)	600	51	150	260	173.33	150	461	76.83
22	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (orang)	38	96	34	33	97.06	4	133	350.00
23	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Terbitnya Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji (orang)	2000	380	1050	775	73.81	500	1655	82.75
24	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya pengetahuan PNS akan Peraturan perundang-undangan Kedisiplinan PNS (Kasus)	33	19	5	8	160	5	32	96.97

25	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terpenuhinya formasi PNSD dan Pengambilan Sumpah PNSD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (orang)	1630	143	447	323	72.26	400	866	53.13
26	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang mutakhir (Buku)	180	80	42	42	100	40	162	90.00
27	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan SAPK (Bulan)	12	36	12	12	100	12	60	500
28	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Orang)	190	17	50	126	252	50	193	101.58
29	Kepangkatan	Jumlah PNS yang Naik Pangkat (Orang)	750		600	691	115.17	50	741	98.80
30	Penyusunan Pola Karir PNS	Jumlah Pola Karir yang tersusun sesuai dengan kompetensi (Jabatan)	12540		823	1216	147.75	50	1266	10.10
31	Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian	Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan penetapan perubahan status kepegawaian berdasarkan peraturan dan perundang-undangan (Orang)	300		144	126	87.5	50	176	58.67

32	Uji Kompetensi Pejabat Administrator	Jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi (Orang)	165		110	85	77.27	50	135	81.82
33	Pengadaan CPNS dan PPPK	Jumlah formasi yang diusulkan (orang)	14000	197	173	173	100	350	720	5.14
	PROGRAM PENINGKATAN MOTIVASI ANGGOTA KORPRI									
34	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUT bagi PNS/ Anggota KORPRI (%)	500	100	100	100	100	100	300	60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Capaian kinerja dibidang tersebut dapat digambarkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat merealisasikan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 serta dapat melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan dengan kategori berhasil, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau permasalahan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019, secara umum telah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tergambar dalam table 2.2 pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah)	IKK	TARGET RENSTRA BKPSDM				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019 TW IV	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (%)	24.5		12.4	13.5	15.5	17.5	13	13.4	19.2	20.3	19.2	24.5	
2	Persentase Aparatur yang memenuhi standar Kompetensi (%)	85		73	76	79	79	70	71.7	80.4	80.1	85	85	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pada hakikatnya, isu merupakan suatu gambaran wacana yang masih diperdebatkan dan belum ditangani dan diolah secara optimal ke dalam suatu agenda pada lembaga tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok - kelompok yang memperoleh keuntungan atau kerugian akibat dampak atau hasil pemecahan isu tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, tuntutan terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur juga telah terjadi pergeseran. Saat ini, sebagian besar masyarakat menginginkan suatu bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari aparatur. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi dan tingkat kesejahteraan aparatur tersebut. Namun yang paling penting untuk mewujudkan hal tersebut, adalah kemauan yang kuat dari semua pihak, untuk bersama-sama memperbaiki pelayanan.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam proses pelaksanaan manajemen kepegawaian, juga berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Isu - isu penting yang berkaitan dengan BKPSDM adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalisme ASN
- b. Pendayagunaan aparatur yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional belum sesuai dengan yang diharapkan
- c. Motivasi ASN untuk mengembangkan potensi dan kompetensi dirinyabelum terwujud
- d. Pemanfaatan Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan kepegawaian belum secara maksimal dilaksanakan
- e. Penempatan Aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi Aparatur
- f. Tingkat disiplin Aparatur yang masih rendah dan belum memahami tentang tugas dan fungsinya sebagai aparatur

Isu-isu penting diatas mengisyaratkan perlunya meletakkan peningkatan pembinaan dan pengembangan PNS menjadi program prioritas dalam menyiapkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi perubahan di era reformasi birokrasi ini.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil musyawarah dari beberapa tingkatan mulai dari desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota yang menjadi acuan suatu program atau kegiatan pada tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan menata pemerintah yang bersih dan professional dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi rasa aman, tenang dan sejahtera, maka dari itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada semua kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran				1,210,301,872	Program Pelayanan Administrasi Perakantoran				1,044,817,551	
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,780,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4,500,000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Tersedianya Dana Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	70,140,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Tersedianya Dana Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	66,800,000	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	112,455,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	107,400,000	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	59,928,281	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	57,072,628	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	102,672,675	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	100,847,523	

6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	42,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	40,000,000	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9,245,916	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	8,597,400	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6,300,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6,000,000	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKPSDM	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	12 Bulan	3,780,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKPSDM	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	12 Bulan	3,600,000	
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	BKPSDM	Tersedianya Biaya Rapat dan Konsultasi	12 Bulan	800,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	BKPSDM	Tersedianya Biaya Rapat dan Konsultasi	12 Bulan	650,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur		822,027,500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur		247,430,000	
11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Terpenuhiya Peralatan Gedung Kantor	100%	209,475,000						
12.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKPSDM	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	79,800,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKPSDM	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	56,000,000	

13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BKPSDM	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	162,750,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	BKPSDM	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	20 Unit	162,780,000	
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	20,002,500	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	34 Unit	28,650,000	
15	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BKPSDM	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	350,000,000						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				59,062,500	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				56,250,000	
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BKPSDM	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	82 stel	59,062,500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BKPSDM	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	150 Stel	56,250,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				64,050,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				75,225,000	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, LPPK, Lakip dan LPPD	12 Bulan	36,225,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, LPPK, Lakip dan LPPD	12 Bulan	39,300,200	
18	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	12 Bulan	27,825,000	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	12 Bulan	35,924,800	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1,953,900,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1,604,942,000	
19	Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri	BKPSDM	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI	10 Orang	200,000,000						
20	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	BKPSDM	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	29 Orang	145,000,000	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	BKPSDM	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	20 Orang	135,450,000	
21	Pendidikan dan pealtihan Perjenjangan	BKPSDM	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan perjenjangan	173 Orang	1,608,900,000	Pendidikan dan pealtihan Perjenjangan	BKPSDM	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan perjenjangan	173 Orang	1,469,492,000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1,502,300,500	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1,743,549,800	
22	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS	100 Orang	65,231,250	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS	150 Orang	56,775,000	
23	Penilaian Kinerja Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan penilaian kinerja	150 Orang	112,922,250	Penilaian Kinerja Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan penilaian kinerja	1568 Orang	105,054,800	
24	Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Terseleksi	10 Orang	192,202,500	Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM	Jumlah Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang	32 Orang	301,675,000	

								berkualitas dan profesionalisme			
25	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	BKPSDM	Jumlah Berkas KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji yang terlayani	500 Orang	26,250,000	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	BKPSDM	Jumlah Berkas KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KP-E/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji yang terlayani	1000 Orang	24,740,000	
26	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin dan Pelayanan status PNS Kab. Tanjab Barat	BKPSDM	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	5 kasus 70 Orang	114,691,500	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat	BKPSDM	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	17 kasus 147 Orang	41,185,000	
27	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	BKPSDM	Terlaksananya pengangkatan dari CPNSD ke PNSD dan Sumpah PNSD	400 Orang	30,135,000	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	BKPSDM	Terlaksananya pengangkatan dari CPNSD ke PNSD dan Sumpah PNSD	858 Orang	30,950,000	
28	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	BKPSDM	Terselenggaranya seleksi penerimaan bantuan beasiswa	150 Orang	370,445,250	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	BKPSDM	Terselenggaranya seleksi penerimaan bantuan beasiswa	120 Orang	351,155,000	
29	Uji Kompetensi Aparatur	BKPSDM	Jumlah Aparatur yang mengikut Uji Kompetensi	115 Orang	157,447,500	Uji Kompetensi Pejabat Administrator	BKPSDM	Jumlah ASN yang memenuhi standar Kompetensi dan Kualifikasi	115 Orang	147,400,000	

30	Pengembangan data dan informasi kepegawaian kab. Tanjung Jabung Barat	BKPSDM	tersedianya data dan informasi kepegawaian yang valid dan Up to date	12 Bulan	43,995,000	Pengembangan data dan informasi kepegawaian	BKPSDM	tersedianya data dan informasi kepegawaian yang valid dan Up to date	12 Bulan	49,500,000	
31	Pengadaan CPNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah CPNSD dan PPPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat	150 Orang	200,000,000	Pengadaan CPNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah CPNSD dan PPPK Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5500 Orang	584,440,000	
32	Rapat Koordinasi Kepegawaian	BKPSDM	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Rakor Kepegawaian	100%	70,000,000						
33	Fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI dan LKBH KORPRI	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan Fasilitasi Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI	3 Kasus	88,000,000						
34	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	BKPSDM	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI	100%	30,980,250	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	BKPSDM	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI	100%	50,675,000	
					5,611,642,372					4,772,214,351	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan dalam rangka menata manajemen kepegawaian pada pemerintahan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan terwujudnya SMART ASN, yaitu ASN sebagai human capital yang profesional, handal, berintegritas, sejahtera dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Nawa Cita. Selain itu, untuk mendukung kebijakan pemerintah dibidang E-Government dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan pemanfaatan system informasi berbasis aplikasi, sehingga akan tercipta efektifitas dan efisiensi dalam mengelola administrasi kepegawaian di Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah, dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, adapun tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah antara lain :

Kode	Tujuan (T)
T.1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.
T.2	Terwujudnya Budaya Kerja dan Etos Kerja Aparatur yang akuntabel dan produktif.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu periode renstra. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran (S)
S.1	Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan Berkompetensi.
S.2	Peningkatan Penataan SDM Aparatur

Indikator Kinerja BKPSDM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
1	Peningkatan Kompetensi Pegawai									
	a. Persentase Pejabat ASN yang Mengikuti Diklat Struktural	%	26.9			27.9	40.9	44.9	48.9	48.9
	b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	11.6	12.4	13.5	15.5	17.5	19.2	24.5	24.5
2	Rasio lulusan S1 Dan S2	%	45.1	59,4	66.3	67.9	73.7	80.4	84	84
3	Rasio lulusan Diploma/DIII	%	28.3	19.5	12.2	12.6	12.6	11.2	10.1	10.1
4	Rasio lulusan SLTA	%	25.4	20	20.5	18.4	12.5	8.2	5.9	5.9

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 mempunyai beberapa program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Untuk menunjang program – program diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan – kegiatan untuk Tahun 2021 yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
14. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
16. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
17. Pendidikan dan pelatihan perjenjangan
18. Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional
19. Peningkatan Pembinaan Disiplin dan Pelayanan Status PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
20. Penilaian Kinerja Aparatur
21. Uji Kompetensi Aparatur
22. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
23. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
24. Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah PNS
25. Seleksi Bantuan Beasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
26. Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/KARTU ASN dan Penghargaan ASN
27. Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian
28. Peringatan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1,194,127,528				1,373,246,657
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51,249,774				58,937,240
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	BKPSDM	12 Bulan	51,249,774	APBD		12 Bulan	58,937,240
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				215,360,050				247,664,058
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	BKPSDM	12 Bulan	35,249,800	APBD		12 Bulan	40,537,270
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Keuangan	BKPSDM	12 Bulan	180,110,250	APBD		12 Bulan	207,126,788
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26,000,000				29,900,000

3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BKPSDM	65 Stel	26,000,000	APBD		65 Stel	29,900,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				542,834,490				624,259,664
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	12 Bulan	6,025,957	APBD		12 Bulan	6,929,851
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BKPSDM	12 Bulan	76,276,720	APBD		12 Bulan	87,718,228
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	BKPSDM	12 Bulan	17,600,000	APBD		12 Bulan	20,240,000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	12 Bulan	32,199,813	APBD		12 Bulan	37,029,785
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	12 Bulan	5,400,000	APBD		12 Bulan	6,210,000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BKPSDM	12 Bulan	405,332,000	APBD		12 Bulan	466,131,800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114,851,214				132,078,896
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat Menyurat	BKPSDM	12 Bulan	4,999,000	APBD		12 Bulan	5,748,850
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik	BKPSDM	12 Bulan	52,780,000	APBD		12 Bulan	60,697,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	BKPSDM	12 Bulan	57,072,214	APBD		12 Bulan	65,633,046

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243,832,000			280,406,800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	BKPSDM	20 Unit	162,840,000	APBD	20 Unit	187,266,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	BKPSDM	22 Unit	25,030,000	APBD	22 Unit	28,784,500
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	BKPSDM	12 Bulan	55,962,000	APBD	12 Bulan	64,356,300
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4,461,731,551			5,130,991,284
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				65,399,774			75,209,740
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah PNS	BKPSDM	308 Org	14,549,974	APBD	308 Org	16,732,470
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Berkas KARIS/ KARSU/ KARPEG/ Kartu ASN dan Penghargaan ASN	BKPSDM	1000 Org	21,350,000	APBD	1000 Org	24,552,500
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data/ Informasi Aparatur yang Valid dan Up to Date	BKPSDM	12 Bulan	29,499,800	APBD	12 Bulan	33,924,770
	Mutasi dan Promosi ASN				356,034,275			409,439,416
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Terseleksi	BKPSDM	8 Orang	356,034,275	APBD	8 Orang	409,439,416

	Pengembangan Kompetensi ASN				3,934,143,709				4,524,265,265
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Penerima Bantuan Beasiswa yang Terseleksi	BKPSDM	120 Org	155,949,859	APBD		120 Org	179,342,338
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	BKPSDM	193 Org	2,836,561,000	APBD		193 Org	3,262,045,150
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Perjenjangan	BKPSDM	163 Org	909,193,157	APBD		163 Org	1,045,572,131
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	150 Org	32,439,693	APBD		150 Org	37,305,647
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				106,153,793				122,076,862
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja	BKPSDM	750 Org	84,303,793	APBD		750 Org	96,949,362
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin dan Pelayanan Status yang terselesaikan	BKPSDM	147 Kasus	21,850,000	APBD		147 Kasus	25,127,500
					5,655,859,079				6,504,237,941

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan:

- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu
- Penilaian Kinerja Aparatur
- Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji ASN
- Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dan Sumpah PNSD
- Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian

- System Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengadaan CPNS dan PPPK
- Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Kepangkatan
- Penyusunan Pola Karir PNS
- Uji Kompetensi Pejabat Administrator
- Peningkatan Pelayanan Status Kepegawaian
- Optimalisasi Penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Satu Pintu
- Peringatan KORPS Pegawai Republik Indonesia

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Daerah Pola Kontribusi
- Diklat Prajabatan Golongan II dan III
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV
- Diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri
- Diklat Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional

BAB V

PENUTUP

Pencapaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah dalam era yang semakin rumit dan kompleks ditengah perubahan yang semakin dinamis menuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mempersiapkan diri secara terus menerus kearah pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kondisi daerah. Pembangunan dan pengembangan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rancangan Akhir Rencana KerjaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s/d 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 maka penetapan prioritas pembangunandiharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



H.R. GATOT SUWRSO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631017 199003 1 005